

**PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG: ANALISIS TAHAPAN
PEMBERDAYAAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHINYA**

Yosafhat Manalu, R. Slamet Santoso

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Poverty remains one of the persistent social challenges faced by local governments, including Semarang City. The paradox between the city's high economic achievements and the 119.04% surge in the number of the poor to 63,091 individuals in 2024 indicates that existing empowerment programs have yet to produce optimal economic independence. This study aims to analyze the stages of empowerment of the poor implemented by the Semarang City Social Service (Dinas Sosial) and to identify the factors influencing its implementation. A qualitative descriptive research method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques, consisting of Social Service officials, PKH facilitators, district social workers (TKSK), and beneficiaries. The findings reveal that empowerment is carried out through three stages: the awareness stage, the capability transformation stage, and the intellectual capacity enhancement stage. At the awareness stage, beneficiaries began to recognize their own potential, although their understanding of poverty remains oriented toward short-term social assistance. At the capability transformation stage, vocational training through the Joint Business Group (KUBE) has enabled some beneficiaries to engage in productive activities, yet its application remains inconsistent due to challenges in business management and marketing. At the intellectual capacity enhancement stage, some beneficiaries have begun to make independent economic decisions, though the ability to systematically develop business plans has not been evenly distributed. The factors influencing the empowerment process include natural resources, human resources, institutional conditions, infrastructure, policy, and organizational-administrative aspects. Low quality of human resources among the poor and budget constraints constitute the most significant obstacles. Strengthening post-program mentoring, improving managerial capacity, and updating the DTKS data are recommended to make the empowerment of the poor more effective and sustainable.

Keywords: *Empowerment of the Poor, Stages of Empowerment, Factors of Empowerment, Social Service, Semarang City*

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk di Kota Semarang. Paradoks antara tingginya capaian ekonomi Kota Semarang dengan lonjakan jumlah fakir miskin sebesar 119,04% menjadi 63.091 jiwa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang berjalan belum menghasilkan kemandirian ekonomi yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling* yang terdiri atas pejabat Dinas Sosial, pendamping PKH, TKSK, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Pada tahap penyadaran, fakir miskin mulai mengenali potensi diri melalui pendampingan, namun pemahaman mengenai kemiskinan masih berorientasi pada bantuan jangka pendek. Pada tahap transformasi kemampuan, pelatihan keterampilan melalui KUBE telah menggerakkan sebagian masyarakat menuju aktivitas produktif, namun penerapannya belum konsisten akibat kendala pengelolaan usaha dan pemasaran. Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, sebagian masyarakat mulai mampu mengambil keputusan ekonomi secara mandiri, namun kemampuan menyusun rencana usaha secara sistematis belum merata. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, keadaan kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi. Rendahnya kualitas SDM fakir miskin dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama yang paling signifikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Fakir Miskin, Tahapan Pemberdayaan, Faktor Pemberdayaan, Dinas Sosial, Kota Semarang

PENDAHULUAN

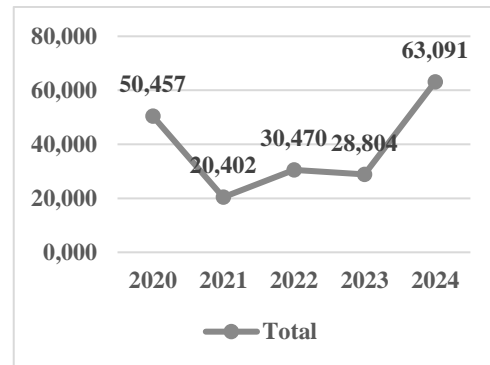
Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 281,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024) menghadapi berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar individu dapat hidup layak serta melaksanakan fungsi sosialnya. Mewujudkan kesejahteraan bagi

seluruh rakyat merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kelompok yang menjadi prioritas penanganan adalah fakir miskin, yakni individu yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah

menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonominya tergolong tinggi, Gini Rasio Kota Semarang mencapai rata-rata 0,40 pada rentang 2020–2023, melampaui rata-rata nasional sebesar 0,388 (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi kesejahteraan, terutama bagi kelompok fakir miskin. Data rekap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menunjukkan pergerakan jumlah fakir miskin yang fluktuatif: dari 50.457 jiwa pada tahun 2020, turun drastis menjadi 20.402 jiwa pada 2021, kemudian melonjak ke 30.470 jiwa pada 2022, dan mencapai puncaknya dengan kenaikan sebesar 119,04% menjadi 63.091 jiwa pada tahun 2024. Lonjakan tersebut terjadi bersamaan dengan data kemiskinan makro BPS yang justru menunjukkan penurunan dari 4,03% menjadi 3,80% (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025), mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara data kemiskinan agregat dan kondisi riil

kelompok fakir miskin di tingkat lapangan.



Gambar 1.1. Grafik Jumlah Fakir Miskin Kota Semarang Tahun 2020-2024

Sumber: Data diolah Peneliti dari Sebaran Data PPKS & PSKS Kota Semarang (2020-2024)

Program pemberdayaan fakir miskin menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjawab permasalahan ini. Secara nasional, Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagai salah satu program perlindungan sosial dengan efektivitas biaya terbaik yang terbukti mampu meningkatkan konsumsi keluarga miskin dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (TNP2K, 2020). Di Kota Semarang, kerangka kebijakan pemberdayaan mencakup PKH, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Permakanan, dan pengembangan UMKM yang dikelola

Dinas Sosial Kota Semarang. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan signifikan: Santoso dkk. (2023) menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran akibat data DTKS yang belum sepenuhnya valid masih menjadi persoalan, sementara Ramadhani & Novarianti (2024) menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kota Semarang belum optimal karena kebijakan tidak diterapkan secara konsisten dan pendampingan belum memadai.

Aspek penyadaran merupakan pondasi utama dalam proses pemberdayaan. Sulistiyani (2017) menegaskan bahwa tahap penyadaran tidak hanya meningkatkan kesadaran mengenai kekurangan, melainkan juga mengenalkan potensi diri sebagai modal awal untuk berubah. Penelitian Ramadhani & Novarianti (2024) di Kota Semarang menemukan bahwa sebagian besar penerima PKH tidak memahami tujuan pemberdayaan jangka panjang dan hanya memandang program sebagai bantuan karitatif, bukan sebagai instrumen kemandirian. Pada aspek transformasi kemampuan, Kementerian Sosial (2023) mencatat

bahwa tantangan terbesar program KUBE secara nasional terletak pada keberlanjutan usaha kelompok setelah bantuan modal awal habis karena keterbatasan keterampilan pengelolaan usaha dan pemasaran. Sementara itu, pada aspek peningkatan kemampuan intelektual, Mardikanto & Soebianto (2012) mempertegas bahwa perencanaan usaha merupakan bagian inti dari proses pemberdayaan menuju kemandirian.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan pemberdayaan. Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa tidak sedikit penduduk miskin perkotaan hanya menempuh pendidikan setingkat SD atau SMP, yang secara langsung membatasi kemampuan mereka dalam mengakses pekerjaan layak dan memahami manajemen usaha. Nyoman Ruja dkk. (2024) menemukan bahwa ketidaksesuaian sasaran program dan rendahnya kapasitas SDM penerima manfaat merupakan dua faktor penghambat terbesar keberhasilan program pemberdayaan. Upaya pengentasan

kemiskinan di Kota Semarang juga selaras dengan target SDGs Nomor 1 tentang penghapusan kemiskinan serta RPJMN 2025–2029 yang menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2029.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tahapan pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi optimalisasi program pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang.

KAJIAN TEORI

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Zubaedi (2007) adalah upaya peningkatan harkat dan martabat golongan masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan tidak dapat melepaskan diri dari kondisi tersebut. Mardikanto & Soebianto (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi

pembangunan berbasis masyarakat (people-centered development) yang selalu mengacu kepada upaya perbaikan kualitas hidup manusia, mencakup perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, dan kesejahteraan komunitas. Suaib (2023) menambahkan bahwa agar masyarakat menjadi subjek pemberdayaan, diperlukan pendekatan yang terarah, melibatkan masyarakat secara langsung, dan menggunakan pendekatan kelompok.

b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2017:83–84), terdapat tiga tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, tahap penyadaran, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi dan posisi mereka sehingga muncul kesadaran sebagai dasar perubahan dan pengenalan terhadap potensi diri. Kedua, tahap transformasi kemampuan, yakni pemberian pengetahuan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan sebagai upaya menguatkan kapasitas

masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, yang mencakup pendampingan, pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi, serta penyediaan akses pada berbagai aktivitas sosial-ekonomi. Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual, yang berfokus pada pembentukan masyarakat yang mandiri dalam mengambil keputusan, membuat perencanaan, dan mengelola kegiatan sosial-ekonominya secara berkelanjutan.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto & Soebianto (2012) menyebutkan enam aspek lingkup wilayah kerja pemberdayaan masyarakat yang secara substantif merupakan elemen-elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan pemberdayaan, yakni:

1. Sumber daya alam, yaitu ketersediaan potensi lokal yang mendukung aktivitas produktif.
2. Sumber daya manusia, yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan motivasi masyarakat.

3. Keadaan kelembagaan, berupa dukungan organisasi lokal dalam memberikan akses informasi dan pendampingan.

4. Sarana dan prasarana, yakni infrastruktur fisik dan penunjang usaha.

5. Kebijakan, yang meliputi regulasi, program pemerintah, dan rencana strategis.

6. Organisasi dan administrasi pemberdayaan yang tertata dengan pembagian peran yang jelas dan koordinasi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses pemberdayaan fakir miskin serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kota Semarang. Menurut Sugiyono (2024:18), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Situs penelitian dilakukan pada Dinas Sosial Kota Semarang, dengan keterlibatan para pendamping PKH

dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta penerima manfaat yang berdomisili di Kota Semarang.

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan. Adapun informan yang digunakan terdiri atas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Staf Pengembangan Ekonomi, Pendamping PKH, TKSK, Anggota KUBE, Penerima PKH, dan Graduasi Mandiri. Teknik *snowball sampling* diterapkan untuk menentukan informan tambahan ketika data yang diperoleh belum jenuh (Sugiyono, 2024). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam, serta sumber data sekunder berupa dokumen resmi, laporan program, dan data DTKS Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2024), yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pemberdayaan Fakir Miskin di Kota Semarang

a. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran menjadi fondasi awal dalam proses pemberdayaan fakir miskin. Menurut Sulistiyani (2017), tahap ini bertujuan mendorong kesadaran masyarakat mengenai kondisi sosial ekonomi yang dialami serta membangun kesadaran terhadap potensi diri sebagai modal perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat mengenai kondisi kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung bersifat praktis dan jangka pendek. Fakir miskin umumnya memaknai kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan

mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok yang harus dibantu negara. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, di mana mayoritas penerima manfaat hanya menempuh pendidikan setingkat SD hingga SMA, serta pola pikir yang terbentuk dari lingkungan sosial dan keluarga. Santoso dkk. (2023) menemukan bahwa di Kota Semarang, ketidaktepatan sasaran program masih terjadi akibat data DTKS yang belum sepenuhnya valid, sehingga pemahaman pemerintah tentang kondisi riil fakir miskin pun masih perlu diperbarui.

Pada indikator kesadaran akan potensi diri, sebagian masyarakat mulai mengenali potensi yang dimiliki melalui pertemuan rutin kelompok, pendampingan sosial, serta kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam program PKH. Kebijakan pembatasan kepesertaan bantuan sosial menjadi maksimal lima tahun yang mulai diterapkan pada tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian. Namun,

fakir miskin yang telah lama bergantung pada bantuan sosial cenderung mengalami kecemasan terhadap kebijakan ini daripada melihatnya sebagai peluang untuk mandiri.

Dengan demikian, tahap kesadaran di Kota Semarang telah menunjukkan perkembangan awal dalam mendorong kesadaran masyarakat, namun masih memerlukan penguatan strategis agar pemahaman masyarakat dapat bergeser dari orientasi bantuan jangka pendek menuju motivasi untuk mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

b. Tahap Transformasi Kemampuan

Tahap transformasi kemampuan mencakup pemberian pelatihan keterampilan dan pengembangan aktivitas produktif bagi fakir miskin. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan keterampilan di Kota Semarang dilakukan melalui dua pendekatan utama: pelatihan teknis berbasis usaha yang dikoordinasikan dengan OPD terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas

Perikanan, dan Dinas Koperasi dan UMKM, serta penguatan kapasitas manajerial dasar melalui modul ekonomi keluarga dalam program PKH.

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi instrumen utama dalam mendorong fakir miskin terlibat dalam aktivitas produktif seperti usaha kuliner, kerajinan anyaman, dan peternakan. Sebagian kelompok menunjukkan perkembangan positif dengan mampu menghasilkan pemasukan tambahan dan mulai bertransisi dari penerima bantuan menuju pelaku usaha skala kecil. Hal ini sejalan dengan temuan Sahirman (2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan yang terstruktur secara konsisten dapat mendorong kemandirian ekonomi.

Meski demikian, penerapan keterampilan dalam aktivitas produktif masih menghadapi kendala serius. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023) mencatat bahwa tantangan terbesar program KUBE nasional terletak pada keberlanjutan usaha setelah bantuan modal awal habis, terutama karena keterbatasan

keterampilan pengelolaan usaha dan pemasaran. Kondisi serupa ditemukan di Kota Semarang, di mana sebagian kelompok masih bergantung pada pendampingan eksternal dan belum mampu mengelola usaha secara mandiri. Penerapan keterampilan yang diberikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu, konsistensi pendampingan, dan dinamika internal kelompok.

Dengan demikian, tahap transformasi kemampuan di Kota Semarang telah menunjukkan kemajuan melalui pendekatan kolaboratif lintas OPD dan pembentukan KUBE, namun efektivitasnya masih belum merata dan memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan usaha serta pendampingan manajerial yang lebih intensif.

c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Tahap peningkatan kemampuan intelektual merupakan bagian tertinggi dalam proses pemberdayaan, di mana fakir miskin dituntut untuk mampu mengambil

keputusan ekonomi secara mandiri dan menyusun rencana pengembangan usaha yang berkelanjutan (Sulistiyani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan positif dalam pengambilan keputusan ekonomi pada sebagian penerima manfaat, terutama dalam memprioritaskan penggunaan bantuan untuk pendidikan anak dan kebutuhan pokok, serta munculnya keberanian untuk merencanakan usaha dan mempertimbangkan peluang pasar.

Pada indikator kemampuan perencanaan usaha, sebagian besar penerima manfaat masih menyusun rencana usaha yang bersifat sederhana dan tidak sistematis. Pemahaman mengenai pemisahan modal dan keuntungan belum terinternalisasi secara konsisten, sehingga pengembangan usaha secara jangka panjang belum menjadi praktik umum. Kementerian Sosial (2022) juga mencatat bahwa kelemahan mendasar anggota KUBE terletak pada kemampuan menyusun rencana usaha, mencatat keuangan, dan memasarkan produk secara mandiri pasca-bantuan. Mustanir dkk.

(2025) menyimpulkan bahwa model pemberdayaan yang paling efektif adalah yang berbasis partisipasi dan aset komunitas, karena mendorong masyarakat untuk aktif melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya sendiri.

Dengan demikian, tahap peningkatan kemampuan intelektual di Kota Semarang masih berada pada fase transisi. Beberapa penerima manfaat menunjukkan keberhasilan dalam mencapai kemandirian, bahkan ada yang berhasil melakukan graduasi mandiri, namun secara keseluruhan kemampuan masyarakat dalam perencanaan usaha yang sistematis dan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat belum merata dan masih memerlukan penguatan pendampingan pascaprogram.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Fakir Miskin di Kota Semarang

a. Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam mencakup ketersediaan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Di Kota Semarang, Dinas

Sosial menyesuaikan pembentukan kelompok usaha dengan karakteristik wilayah dan sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat. KUBE di wilayah dekat perairan diarahkan pada usaha perikanan, sementara di wilayah permukiman padat diarahkan pada usaha pengolahan makanan atau kerajinan tangan. Pemanfaatan bahan baku lokal seperti plastik daur ulang untuk kerajinan anyaman pada KUBE Bukit Rejo Maju Jaya menunjukkan potensi yang nyata dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Namun, kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi tersebut secara mandiri belum merata dan masih bergantung kepada kapasitas individu serta pendampingan yang diberikan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling determinan dalam proses pemberdayaan. Mardikanto & Soebianto (2012) menyatakan bahwa kualitas SDM yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan motivasi menjadi penentu utama

keberhasilan pemberdayaan. Di Kota Semarang, rendahnya tingkat pendidikan fakir miskin — mayoritas hanya lulusan SD hingga SMP — secara langsung membatasi kemampuan dalam mengakses pekerjaan layak dan memahami manajemen usaha (Badan Pusat Statistik, 2024). Pemahaman manajerial mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, dan administrasi usaha masih sangat terbatas sehingga memengaruhi keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, motivasi yang lahir dari dorongan internal seperti kebutuhan keluarga dan harapan terhadap pendidikan anak menjadi modal sosial yang kuat. Abdul Ahmad Ali (2020) menemukan bahwa strategi pemberdayaan paling efektif bagi kelompok miskin adalah yang menguatkan SDM melalui pelatihan, pemberian modal, dan pembentukan organisasi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan aspek pengetahuan, keterampilan, dan motivasi menjadi prasyarat utama keberhasilan pemberdayaan di Kota Semarang.

c. Keadaan Kelembagaan

Struktur kelembagaan pemberdayaan di Kota Semarang berjalan secara berjenjang melalui Dinas Sosial, pendamping PKH, TKSK, serta perangkat kelurahan dan kecamatan. Koordinasi antar-aktor ini memungkinkan program pemberdayaan dijalankan secara terintegrasi dari tingkat kota hingga masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam kelompok seperti KUBE belum sepenuhnya stabil karena adanya dinamika internal kelompok dan ketergantungan pada pendamping eksternal. Rosmida dkk. (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh perencanaan, pendampingan, serta pembinaan teknis yang rutin. Tanpa *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan, program cenderung tidak berlanjut pada praktik yang nyata.

d. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi pendukung penting dalam aktivitas produktif masyarakat. Mekanisme distribusi bantuan berupa modal usaha dan alat

produksi kepada KUBE telah tersedia dan dapat diakses melalui para pendamping. Namun, keterbatasan alat pendukung pelatihan serta dukungan teknis usaha masih memengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas masyarakat. Beberapa KUBE masih menggunakan peralatan sederhana dengan kapasitas produksi yang terbatas, sehingga menghambat peningkatan skala usaha. Aksesibilitas fasilitas pendukung usaha juga belum merata, terutama bagi kelompok yang berlokasi jauh dari pusat pelayanan.

e. Kebijakan

Kebijakan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang telah tersedia secara relatif lengkap mencakup PKH, KUBE, Program Permakanan, dan pengembangan UMKM yang mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta target SDGs Nomor 1. Namun, keterbatasan anggaran dan

prioritas program menyebabkan tidak semua usulan pemberdayaan dapat diakomodasi. Ramadhani & Novarianti (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kota Semarang belum optimal karena kebijakan tidak diterapkan secara konsisten. La Didi (2024) juga menemukan bahwa meskipun program pemberdayaan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, pelaksanaannya sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran.

f. Organisasi dan Administrasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Semarang telah memiliki pembagian peran yang jelas antara Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Jaminan Sosial, yang memungkinkan program pemberdayaan dan bantuan sosial berjalan secara terkoordinasi. Mekanisme *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan bersama antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan penerima manfaat. Namun, sistem

pelaporan dan pengelolaan data masih bersifat berjenjang dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Keterbatasan kapasitas administratif di tingkat lapangan, khususnya pada aspek pencatatan dan pelaporan kegiatan kelompok usaha, juga masih memengaruhi kualitas data yang digunakan sebagai dasar evaluasi program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Semarang telah dilaksanakan melalui tiga tahapan sesuai teori Sulistiyani (2017). Pada tahap penyadaran, masyarakat mulai mengenali potensi diri melalui pendampingan dan pertemuan kelompok rutin, namun pemahaman mengenai kemiskinan masih berorientasi pada bantuan jangka pendek dan kesadaran terhadap strategi kemandirian belum terbentuk secara merata. Pada tahap transformasi kemampuan, pelatihan keterampilan melalui KUBE dan pendampingan lintas OPD telah mendorong sebagian masyarakat

terlibat dalam aktivitas produktif, namun penerapannya belum konsisten akibat kendala pengelolaan usaha, pemasaran, dan dinamika internal kelompok. Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, terdapat perubahan positif dalam pengambilan keputusan ekonomi, namun kemampuan menyusun rencana usaha secara sistematis dan pemisahan modal-keuntungan belum terinternalisasi secara merata.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan mencakup enam aspek. Faktor-faktor yang mendukung meliputi tersedianya potensi lokal, motivasi masyarakat yang kuat, struktur pendampingan berjenjang, dan kerangka kebijakan yang relatif lengkap. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat adalah rendahnya kualitas SDM fakir miskin dalam hal pengetahuan dan keterampilan manajerial, keterbatasan anggaran, inkonsistensi implementasi kebijakan, sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta ketergantungan kelompok pada pendamping eksternal. Rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan

anggaran merupakan penghambat utama yang paling signifikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan.

- a. Dinas Sosial Kota Semarang perlu memperkuat tahap penyadaran melalui penguatan materi sosialisasi yang menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, serta penyampaian contoh konkret penerima manfaat yang berhasil mandiri.
- b. Pendamping PKH dan TKSK perlu meningkatkan intensitas *monitoring* berkala terhadap perkembangan usaha dan memberikan bimbingan teknis terkait pencatatan keuangan sederhana serta strategi pemasaran.
- c. Dinas Sosial bersama OPD teknis perlu mengembangkan pelatihan manajemen usaha lanjutan yang mencakup pengelolaan

keuangan, pemisahan modal dan keuntungan, serta pengembangan akses pasar.

- d. Pemutakhiran data DTKS secara berkala dan sistematis perlu diperkuat agar program pemberdayaan dapat menjangkau sasaran yang tepat.
- e. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai dampak kebijakan pembatasan kepesertaan bantuan sosial maksimal lima tahun yang mulai diterapkan tahun 2025 terhadap proses pemberdayaan dan kemandirian fakir miskin dalam jangka menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. A. (2020). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin nelayan tradisional. *Pondasi*, 25(1), 37–49.
- Ayun, Q., & Yulianingsih, W. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan merajut untuk meningkatkan ekonomi warga di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. *J+ Plus UNESA*, 10(2), 296–301.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025). *Kemiskinan Kota Semarang*. Diakses dari <https://semarangkota.bps.go.id/id>
- Didi, L. (2024). Alleviating extreme poverty through community empowerment programs. *Advance in Social Humanities Research*, 2(6), 829–839.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan evaluasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan pelaksanaan program KUBE nasional*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustanir, A., Sellang, K., Adnan, A. A., & Lubis, S. (2025). Tracing the evolution of community empowerment models in development planning. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(3), 400–427.
- Najamudin, F., & Al Fajar, A. H. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan ABCD untuk mencapai SDG 1: Tanpa kemiskinan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142–158.

- Ramadhani, O. D., & Novarianti, W. D. (2024). Efektivitas dan evaluasi kerja Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 689–700.
- Rosmaida, R., Sudi, A., & Daud, Y. (2021). Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Tawalian. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 45–59.
- Ruja, N., Sumarmi, & Idris. (2024). Programs, opportunities, and challenges in poverty reduction: A systematic review. *Sagepub Journal*, 14(2).
<https://doi.org/10.1177/21582440241256242>
- Sahirman, S. (2022). Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Koto Tangah oleh Rumah Zakat Kota Padang. *Jurnal al-Mizan*, 9(1), 65–82.
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94.
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479.
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati, A., Syamsuddin, R. S., & Rahman, E. T. (2022). Pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui Program Keluarga Harapan: Studi deskriptif keluarga penerima manfaat Desa Bongas Kulon. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan (Edisi ke-2)*. Yogyakarta: Gava Media.
- TNP2K. (2020). *Efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Zubaedi. (2007). *Wacana pembangunan alternatif: Ragam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.